

KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU TAHUN 2007, 2008, 2009

M. Fikri Hadi

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Riau

ABSTRAK

Untuk mengetahui kondisi perekonomian Provinsi Riau tahun terakhir, dapat dilihat dari beberapa aspek seperti perkembangan Priduk Domestik Regional Bruto baik harga konstan maupun harga berlaku, Pertumbuhan ekonomi yang dicapai jumlah investasi, Kesempatan Kerja dan Tingkat pengangguran serta Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Riau dalam kurun waktu yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 23, 43 %, 27, 42 %, dan 20, 17 %. Sedangkan porsentase jumlah investasi dengan PDRB harga berlaku masing-masing sebesar 88 , 20 % , 62, 23 %, dan 51, 11 %. Sehingga besarnya ICOR pada masing-masing tahun adalah 3, 76, 2, 27 dan 2, 53 . Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi yang kurang berimbang sehingga lebih menjurus kepada sub sektor atau sektor yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi lebih diminati oleh penanam modal , menyebabkan sektor sektor yang mempengaruhi hidup rakyat banyak terabaikan.

1. PENDAHULUAN

Dalam khidupan sehari-hari, manusia membutuhkan barang-barang dan jasa-jasa, baik yang dihasilkan oleh produksi Daerah maupun yang diperoleh dari luar Daerah. Mengingat jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat, maka dengan sendirinya penyediaan barang-barang dan jasa-jasa tersebut terus bertambah pula. Bila tidak demikian halnya maka akan terjadi kemunduran dalam tingkat kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyediaan barang-barang dan jasa-jasa ini lazim disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan demikian, sasaran laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu perencanaan pembangunan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan penduduk hanya dengan demikian tingkat pendapatan per kapita dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Perhitungan pendapatan nasional merupakan suatu usaha untuk memperkirakan jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka tertentu biasanya satu tahun. Namun demikian Prof. Hendra Esmara (Perencanaan Pembangunan PAU – EK – UI – 1974) lebih jauh menjelaskan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk memperhatikan jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Namun demikian terdapat satu cara yang lazim dipergunakan untuk menjumlahkan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah, yaitu dengan mempergunakan harga dari masing-masing barang dan jasa tersebut. Dengan memperkalikan jumlah produksi dan harga, akan diperoleh nilai produksi. Nilai produksi inilah yang merupakan penjumlahan dari semua produksi barang-barang dan jasa. Perkiraan pendapatan daerah harus mencegah terjadinya-perhitungannya ganda yang mungkin terjadi antar produksi barang-barang dan jasa-jasa. Perhitungan ganda terjadi sebagai akibat suatu proses produksi, mengenai produksi suatu barang dapat merupakan bahan baku dari produksi lainnya. Pemakaian bahan baku ini atau biasa disebut sebagai bahan masukan (input) dalam suatu proses produksi, perlu dikeluarkan dari perhitungan produksi tersebut. Bila tidak demikian halnya, maka produksi bahan baku ini akan terhitung dua kali. Pertama pada produksi bahan baku itu sendiri, kedua pada produksi yang menggunakan bahan baku tersebut.

Mengingat masalah ini, perhitungan PDRB, dilakukan dengan mempergunakan konsep nilai tambah dan bukan nilai produksi dari masing-masing barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Perbedaan kedua nilai ini terletak pada perkiraan biaya antara yang terdapat dalam nilai produksi. Biaya antara ini merupakan biaya masukan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu jenis produksi. Konsep nilai tambah ini akan memegang peran penting dalam perhitungan PDRB. Kegiatan menghasilkan produksi suatu barang akan dapat diperhitungkan nilai tambahnya melalui perhitungan nilai produksi dikurangi dengan biaya antara, sehingga dapat dihindarkan perhitungan ganda dalam perkiraan PDRB. Keseluruhan nilai tambah sebagaimana diperlihatkan melalui metode perhitungan tertentu, akan menghasilkan PDRB. Dengan perkataan lain PDRB memperlihatkan jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam wilayah, baik oleh kegiatan penduduk dan perusahaan-perusahaan Nasional maupun Asing.

2. STRUKTUR EKONOMI RIAU

Berdasarkan konsep diatas maka jumlah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Tahun 2007 atas dasar harga belaku sebesar Rp. 117.034,93 miliar (Table.1), yang didominasi oleh Sektor Pertanian khususnya Sub Sektor Perkebunan sebesar Rp. 22.257,31 miliar atau 19,02 %, Sektor Industri Rp. 35.1992,20 miliar atau 30,16% dan Sektor Perdagangan Rp. 14.064,41 miliar atau 12,02 %. Jika dilihat dari presentase sumbangannya terhadap PDRB adalah sebesar 61,20 %. Sedangkan peranan sekto-sektor lainnya seperti Pertambangan, Listrik, Bangunan, Pengangkutan, Uang dan Bank, Jasa serta 4 sub sektor lainnya hanya sebesar 38,80 %. Berdasarkan data ini ternyata struktur perekonomian Provinsi Riau masih tidak seimbang, hal ini akan berpengaruh kepada variabel-variabel lainnya seperti kesempatan kerja, tingkat pengangguran dan jumlah investasi.

Tabel 1 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Tahun 2007, 2008, 2009 Provinsi Riau Tanpa Migas (Miliar Rp)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
Pertanian	43.595,15	53.137,54	60.667,06
- Tan. Pangan	2.437,30	2.797,04	3.056,44
- Perkebunan	22.257,31	26.879,91	29.936,86
- Peternakan	1.198,93	1.642,45	2.138,52
- Kehutanan	13.899,72	17.185,48	20.042,03
- Perikanan	3.801,89	4.632,66	5.493,21
Pertambangan	2.016,04	3.010,52	4.157,02
Industri	35.292,20	43.675,67	51.596,28
Listrik	392,73	461,08	524,53
Bangunan	7.043,07	11.308,25	14.728,57
Perdagangan	14.064,41	19.317,09	24.828,97
Pengangkutan	3.853,21	4.867,26	5.750,51
Usaha dan Bank	3.924,15	5.068,11	6.631,07
Jasa	6.853,97	8.279,66	10.312,55
PDRB	117.034,93	149.125,18	179.196,59

Sumber : Riau dalam angka Tahun 2008, 2009 dan 2010

Kondisi ini hampir tidak berubah pada Tahun 2008, dimana jumlah PDRB sebesar Rp. 149.123,18 miliar, Sub Sektor Perkebunan mencapai Rp. 26.879, 91 miliar atau 18, 08 %, Sektor Industri Rp. 43.675.67 miliar atau 29,29 % dan Sektor Perdagangan Rp. 19.317,09 miliar atau 12,83 %, sehingga peranan sub sektor Perkebunan, sektor Industri dan Perdagangan telah mencapai 16,15 %, dan peranan sektor-sektor lainnya dan empat sub sektor di sektor pertanian sebesar 39,85 %. Pada tahun 2009 struktur ekonomi Provinsi Riau sedikit mengalami perubahan yaitu peranan Sub Sektor Perkebunan, Sektor Industri dan Sektor Perdagangan sedikit menurun menjadi 59,36 % yaitu sub sektor Perkebunan Rp. 29.936,86 miliar atau 16,36 % , sektor Industri Rp 51.596.28 miliar atau 28,79 % dan sektor Perdagangan Rp 24828,97 miliar atau 13,86 %. Peranan Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2007 sebesar 19,02 % dan di Tahun 2009 menjadi 16,71, sektor Industri peranannya 30,16 % Tahun 2007 menurun menjadi 28,79 % tahun 2009 dan sektor Perdagangan sedikit meningkat dari 21,02 % tahun 2007 menjadi 13,86 % tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan perubahan peranan dari beberapa sub sektor di sektor Pertanian dan sektor-sektor lainnya. Namun demikian turunya peranan beberapa sektor dan sub sektor perlu dicermatikan karena turunya sumbangan sub sektor tersebut apakah karena turunya produksi atau karena faktor lainnya

Tabel 2 : Distribusi Porsentase Prodik Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Provinsi Riau Tahun 2007 , 2008 , Dan 2009 (%)

Lapangan usaha	2007	2008	2009
Pertanian	37, 25	35, 63	33, 87
- Tan . Pangan	2, 08	1, 88	1, 71
- Perkebunan	19, 02	18, 03	16, 71
- Peternakan	1, 02	1, 10	1, 19
- Kehutanan	11, 88	11, 52	11, 18
- Perikanan	3, 25	2, 02	2, 32
Pertambangan	1, 72	2, 02	2, 32
Industri	30, 16	29, 29	28, 79
Listrik	0, 34	0, 31	0, 29
Bangunan	6, 02	7, 58	8, 22
Perdagangan	12, 02	12, 83	13, 86
Pengangkutan	3, 29	3, 26	3, 21
Uang dan Bank	3, 35	3, 40	3, 70
Jasa	5, 85	5, 68	5, 75
PDRB	100, 00	100, 00	100, 00

Sumber : Riau dalam angka tahun 2008, 2009, dan 2010

Ketidak seimbangan struktur ekonomi sudah terlihat pada Tahun 2007, dimana peranan Sub Sektor Perkebunan, Sektor Industri dan Sektor Perdagangan sudah terlalu besar, dilain pihak peranan sub sektor Tanaman Pangan menurun dari 2,08 % tahun 2007 menurun menjadi 1,71 % di Tahun 2009, demikian juga peranan sub sektor kehutanan turun dari 11,88 % menjadi 11,18 % dan sub sektor perikanan turun dari 3,25 % menjadi 3,07 %. Adapun lokasi sub sektor tanaman pangan, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan berada di daerah pedesaan yang justru harus menjadi perhatian terutama dalam usaha pengentasan kemiskinan. Disamping manfaat PDRB harga berlaku untuk melihat struktur ekonomi, juga dapat ditentukan besarnya pendapatan per kapita karena pendapatan per kapita ditentukan oleh PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, yang untuk tahun 2007 sebesar Rp. 37.859.624,90 atau US \$ 3.683,22 dan tahun 2008 sebesar Rp 48.694.835,19 atau US \$ 5.125,77 dan di tahun 2009 menjadi Rp 55.044.745,62 atau US \$ 6.184,80, pendapatan per kapita untuk tahun-tahun tersebut termasuk tinggi karena termasuk migas. Apabila peranan migas untuk tahun 2007 sebesar Rp. 21.099.269,34 atau US \$ 2.152,99, dan pada tahun 2008 naik menjadi Rp 26.272.162,36 atau US \$ 2.765,49 dan pada tahun 2009 naik lagi menjadi Rp. 30.871.677,45 atau US \$ 3.468,78. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pendapatan per kapita baik termasuk migas atau tidak termasuk migas terus meningkat, demikian juga dalam hitungan US \$.

3. PERKEMBANGAN INVESTASI

Tidak jarang pula PDRB atau dasar harga berlaku dijadikan dasar untuk menentukan besarnya investasi setiap tahun, walaupun cara penentuan jumlah investasi yang demikian itu bersifat sangat makro, namun sebagai alat analisa kebijakan mikro sangat bermanfaat, terutama untuk mengetahui distribusi investasi menurut sektor-sektor dan sub sektor. Dengan diketahui distribusi investasi menurut sektor dan sub sektor dapat diketahui sektor-sektor dan sub-sub sektor yang diminati oleh para investor. Untuk Provinsi Riau berdasarkan struktur ekonomi jelas kelihatan bahwa sektor dan sub sektor yang paling diminati adalah sektor industry, sektor perdagangan dan sub sektor perkebunan, sedangkan sektor dan sub sektor lainnya kelihatan masih

perlu ditingkatkan investasinya baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Biasanya untuk menentukan jumlah investasi dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan cara sebagai berikut :

$$I = \text{PDRB harga berlaku} \times \text{Pertumbuhan harga berlaku} \times \text{ICOR}$$

PDRB atas dasar harga berlaku belum merupakan PDRB yang sesungguhnya karena PDRB yang demikian itu termasuk pengaruh inflasi sehingga nilai yang diperoleh menjadi tinggi. Untuk mendapatkan PDRB yang riil, unsur inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan indeks implisit yang menggambarkan pengaruh inflasi pada setiap sektor dan sub sektor setiap tahun. Angka indeks implisit ini biasanya dikeluarkan oleh BPS baik di daerah maupun di pusat. Dengan menggunakan indeks implisit maka PDRB atas dasar harga berlaku dapat ditentukan PDRB atas dasar harga konstan atau disebut juga PDRB riil. Indeks implisit pada saat sekarang mempunyai tahun dasar yaitu tahun 2000. Dengan demikian tingkat harga setelah tahun 2000, dikembalikan pada tingkat harga tahun 2000 sehingga unsure inflasi dapat dihilangkan. Oleh karena itu PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah PDRB yang tidak terpengaruh oleh unsur inflasi atau dinamakan juga PDRB riil. Metode yang digunakan untuk mendapatkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah PDRB atas dasar berlaku dibagi dengan indeks implisit dikalikan dengan 100 pada tahun masing-masing. Dengan menggunakan cara seperti diatas maka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Riau tahun 2007 adalah sebesar Rp. 39.420,71 miliar yang terdiri dari sub sektor perkebunan Rp. 5.622,05 miliar, sektor industri Rp. 6.934.90 miliar dan sektor perdagangan Rp. 6.840,26 miliar, peranan ketiga sub sektor dan sektor diatas adalah sebesar 59,35 %, sedangkan sektor-sektor dan sub sektor lainnya berjumlah Rp. 20023,50 miliar atau 40,65 %.

Untuk tahun 2008 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah Rp. 42.596,88 miliar yang terdiri dari sub sektor perkebunan Rp. 6.071,61 miliar, sektor industri Rp. 7.557,51 miliar dan sektor perdagangan Rp. 7.504,88 miliar sehingga peranannya menjadi 49,61 % dan sektor lainnya Rp. 21.463,33 miliar atau 50,80 %. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 berjumlah Rp. 45.338,34 miliar dengan sumbangan sub sektor perkebunan Rp. 6.439,65 miliar, sektor industri Rp. 8.027,28 miliar dan sektor perdagangan Rp. 8.159,56 miliar dengan perannya sebesar 49,91 % dan sektor lainnya berjumlah Rp. 22.711,85 miliar atau 50,09 %.

Peranan dari sub sektor perkebunan, sektor industri dan sektor perdagangan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terhap PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 seakan akan tidak berubah yaitu bergerak sekitar 49 % lebih. Keadaan ini hampir sama jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Artinya baik ditinjau dari segi PDRB harga berlaku dari segi PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, tetap saja kondisi ekonomi Provinsi Riau tidak terdapat keseimbangan diantara sektor dan sub sektor..

Tabel 3 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Provinsi Riau Tahun 2007, 2008, 2009 (Milyar Rp)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009
Pertanian	14.785,88	15.494,27	16.057,88
- Tan. Pangan	1.768,51	1.809,45	1.834,02
- Perkebunan	5.622,05	6.071,16	6.439,65
- Peternakan	751,97	813,62	865,55
- Kehutanan	5.168,66	5.231,58	5.293,73
- Perikanan	1.456,69	1.568,46	1.624,93
Pertambangan	645,26	762,26	861,92
Industri	6.934,90	7.557,51	8.027,28
Listrik	185,05	197,74	203,71
Bangunan	2.674,93	2.972,88	3.229,28
Perdagangan	6.840,26	7.504,88	8.159,56
Pengangkutan	2.331,64	2.575,35	2.784,29
Usaha dan Bank	1.011,84	1.149,98	1.264,90
Jasa	4.010,95	4.382,01	4.749,34
PDRB	39.420,71	42.596,88	45.338,34

Sumber : Riau dalam angka Tahun 2008, 2009 dan 2010

Kondisi seperti diatas hendaknya menjadi perhatian bagi pengambil keputusan kebijakan, baik Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain yang terikat. Ketidakseimbangan struktur sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan diantara kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan intervensi dengan mengambil kebijaksanaan agar sumber daya pembangunan dapat didistribusikan secara baik terhadap sub sektor dan sektor khususnya sub sektor dan sektor yang menyangkut kehidupan masyarakat khususnya didaerah pedesaan seperti sub sektor peternakan, sub sektor tanaman pangan., sub sektor perikanan, serta usaha menengah, usaha kecil dan Mikro dan Koperasi dan Industri kecil, industri Rumah Tangga dan lain sebagainya. Apalagi sub sektor dan sektor-sektor tersebut berada didaerah pedesaan dan dapat diberikan lapangan kerja khususnya bagi tenaga kerja yang pendidikannya relative rendah. Disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam kenyataannya mobilitas tenaga kerja diantara sektor masih sangat rendah sebagai akibat tingkat pendidikan yang relatif rendah, kurang keterampilan dan infrastruktur didaerah pedesaan masih belum memadai sehingga lalulintas barang daerah produksi dengan daerah pemasaran masih belum lancar atau sempurna.

Menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi, ada empat sasaran yang dapat ditempuh dalam menetapkan laju pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia didaerah.
3. Pemilihan laju pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan pinjaman luar negeri.
4. Penetapan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih didasarkan pada kepentingan politik dari pertimbangan ekonomi.

Perkiraan sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan, sebagaimana terdapat dalam alternatif pertama, sukar dapat diterima. Kebutuhan daerah sesuai dengan sifatnya. Sangat besar sehingga sukar dicari batas pemisah yang cukup jelas. Bila pendekatan ini yang digunakan, maka laju pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai menjadi tinggi sekali. Semakin tinggi sasaran yang akan dicapai akan semakin besar pula kebutuhan investasi. Sebaliknya kemampuan sumber daya yang tersedia sama sekali tidak mendukung sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Keinginan untuk menetapkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi terlihat pula pada alternatif keempat. Kepentingan politik biasanya memerlukan penyusunan suatu perencanaan pembangunan yang bersifat mercusuar. Setidak-tidaknya memberikan kesan pada masyarakat bahwa pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Walaupun demikian perencanaan seperti ini tidak akan mungkin dapat dilaksanakan. Bukan saja sumber pembiayaan yang akan mendukung perencanaan tersebut tidak tersedia., tetapi tenaga kerja dan keterampilan yang ada sama sekali tidak memadai. Perencanaan yang demikian berusaha untuk menyenangkan hati rakyat, walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebaliknya dipihak lain, terdapat pula anggapan bahwa penetapan sasaran laju pertumbuhan ekonomi haruslah disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sebagaimana terdapat dalam alternatif kedua. Daerah-daerah yang sedang giat melaksanakan pembangunan sesuai dengan sifatnya belum mempunyai kemamouan yang cukup tinggi dalam melaksanakan pembangunannya. Bila sekiranya sasaran laju pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, maka sudah dapat diduga, bahwa sasaran tersebut menjadi lemah atau rendah sekali. Keadaan ini sama saja dengan tidak mealukan pembangunan.

Sasaran laju pertumbuhan ekonomi, dengan demikian tidak mungkin didasarkan atas kebutuhan atau kemampian semata mata. Suatu perencanaan pembangunan, pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan ini kemampuan yang ada tidak seberapa besarnya. Tidaklah terlalu kelebihan apabila dikatakan bahwa setiap perencanaan pembangunan selalu dirancang sedemikian rupa sehingga diatas kemampuannya. Namun demikian perencanaan pembangunan tersebut jangan samapi terjebak kedalam alternatif pertama dan ketiga.

Dengan perkataan lain, dalam suatu perencanaan selalu terdapat kesenjangan antara tersedianya tabungan dan kebutuhan investasi. Kesenjangan tabungan ini (*saving-investment gap*), biasanya ditutupi dengan pinjaman luar negeri.

Penetapan sasaran laju pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat pula berfungsi sebagai suatu alat untuk menentukan kebutuhan pinjaman luar negeri, sebagaimana terletak pada alternatif keempat. Dengan perkataan lain, besarnya kebutuhan pinjaman luar negeri ini yang akan menentukan besarnya sasaran laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal yang seperti ini biasanya jarang dilakukan, karena negara-negara donor tidak tertarik dengan perencanaan pembangunan seperti ini. Kombinasi alternatif pertama dan kedua didalam penentuan sasaran laju pertumbuhan ekonomi merupakan cara yang lazim dipergunakan dalam penyusunan suatu rencana pembangunan. Walaupun demikian faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tersebut perlu mendapat perhatian khususnya antara lain situasi politik, keadaan sosial dan perubahan yang terjadi dalam perkembangan ekonomi nasional dan dunia.

Dengan demikian penentuan sasaran laju pertumbuhan ekonomi tersebut mempunyai implikasi yang cukup luas terhadap perkembangan pembangunan dimasa mendatang. Masalah yang dihadapi didalam penentuan sasaran tersebut bukan saja terletak pada aspek kualitatif lainnya. Perhitungan kuantitatif yang kompleks, dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang kuat, belum menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu rencana pembangunan, masih terdapat jurang yang cukup dalam antara penyusun suatu perencanaan dengan pelaksanaan perencanaan itu sendiri. Namun demikian tidak pula dapat disangkal bahwa perhitungan kuantitatif yang kuat akan membantu terciptanya suatu perencanaan pembangunan yang kuat pula.

Usaha-usaha untuk mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan pembangunan, tidak akan terlepas dari berbagai kendala yang terdapat dalam perekonomian daerah itu sendiri. Lewis mengemukakan setidaknya-tidaknya terdapat empat macam kendala yang dihadapi masa mendatang yaitu keterbatasan sumber daya alam, tenaga kerja terdidik, kapasitas industri barang-barang modal dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Dalam beberapa hal, penyusun suatu perencanaan selalu dikaitkan dengan usaha-usaha industrialisasi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun demikian keberhasilan usaha-usaha untuk mencapai suatu sasaran laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada hasil yang akan dicapai oleh sektor pertanian. Sektor pertanian masih tetap merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kehidupan penduduk didaerah pedesaan. Kekuatan suatu perekonomian untuk menghasilkan produksi barang dan jasa, sebenarnya sangat tergantung dari kekuatan permintaan yang ada baik didaerah sendiri atau daerah lain. Kekuatan permintaan ini akan mempengaruhi pola-pola produksi yang akan dikembangkan dan perencanaan tersebut.

Penetapan sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau kelihatannya lebih berat kepada pola pertama, kedua dan keempat karena Provinsi Riau lebih mempunyai sumber daya alam yang lumayan dan juga mempertimbangkan permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pengetasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dan sedikit bernuansa politis. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya ada juga yang tidak sinkron dengan tujuan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ditahun 2007 cukup mengesankan yaitu sebesar 8,25 %. Pertumbuhan yang demikian itu dapat dicapai karena pertumbuhan sektor unggulan seperti sub sektor perkebunan dengan laju pertumbuhan 7,04 %, sektor industri 11,41 % dan sektor perdagangan sebesar 8,94 %. Hal ini dapat dimaklumi bahwa hamper 60 % dari PDRb harga berlaku disumbangkan oleh sub sektor dan sektor-sektor tersebut. Adapun pertumbuhan sektor-sektor lainnya cukup mengembirakan seperti sektor bangunan 11,65 %, sektor uang dan bank 13,31 % dan sektor pertambangan dan galian sebesar 24,57 %. Sebaliknya khususnya sub sektor pada sektor pertanian selain dari sub sektor perkebunan, pertumbuhannya relatif rendah antara lain sub sektor tanaman pangan hanya tumbuh 2,53 %, sub sektor kehutanan 2,2 % dan sub sektor lainnya pertumbuhannya cukup lumayan antara lain sub sektor peternakan 7,48 % sub sektor perikanan 7,75 %.

Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sedikit menurun walaupun masih diatas 8,00 % yaitu sebesar 8,06 %. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan sub sektor dan sektor unggul lainnya seperti sub sektor perkebunan pertumbuhannya naik menjadi 7,99 %, sektor industri kelihatannya menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 8,98 % dan sektor perdagangan naik menjadi 9,72 %. Sektor-sektor lainnya yang juga turun pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan galian menjadi 11,81 %, sektor bangunan 11,14 % dan sektor jasa 9,25 %. Pada sektor pertanian selain sub sektor perkebunan yaitu sub sektor tanaman pangan turun menjadi 2,31 %, sub sektor kehutanan turun menjadi 0,92 %, sub sektor perikanan turun menjadi 7,67 %, hanya pada sub sektor perikanan yang meningkat menjadi 8,20 %.

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau turun dengan tajam yaitu sebesar 6,44 % lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2007 dan tahun 2008. Turunnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di tahun 2009 adalah karena turunnya pertumbuhan sub sektor dan sektor-sektor unggulan yaitu sub sektor perkebunan yang ada pada tahun 2007 tumbuh sebesar 7,48 % pada tahun 2009 turun menjadi 6,07 %. Sektor industri yang semula pertumbuhannya 11,41 % turun menjadi 8,72 % dan sektor perdagangan sebesar 8,94 % turun menjadi 8,72 %. Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa sub sektor perkebunan dan sektor-sektor industri dan perdagangan perannya hampir 60 % dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dan pada tahun 2009 ini hampir seluruh sub sektor dan sektor-sektor pertumbuhannya turun. Pada sektor pertanian pertumbuhannya di tahun 2007 sebesar 4,84 %, pada tahun 2009 turun menjadi 3,63 %, terutama pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2007 sebesar 2,53 % dan di tahun 2009 menjadi 1,36 %, sub sektor peternakan turun menjadi 6,38 %, sub sektor kehutanan sebesar 1,19 % dan sub sektor perikanan turun menjadi 3,60 % sedangkan pada tahun 2007 masih mencapai 7,75 %, sub sektor kehutanan juga turun dari 2,21 % menjadi 1,19 %.

Tabel 4 : Pertumbuhan PDRB Dan Sektor Atas Dasar Migas Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Provinsi Riau Tahun 2007, 2008 Dan 2009 (Persen)

Lapangan usaha	2007	2008	2009	Rata-rata
Pertanian :	4,84	4,79	3,64	4,21
- Tan . Pangan :	2,53	2,31	1,36	1,64
- Perkebunan :	7,04	7,99	6,07	7,03
- Peternakan :	7,48	8,20	6,38	7,29
- Kehutanan :	2,21	0,92	1,19	1,03
- Perikanan :	7,75	7,67	3,60	5,62
Pertambangan :	24,57	11,81	13,07	15,57
Industri :	11,41	8,98	6,21	7,56
Listrik :	5,62	6,86	3,03	4,93
Bangunan :	11,65	11,14	8,62	9,87
Perdagangan :	8,94	9,72	8,72	9,22
Pengangkutan :	7,28	10,45	8,11	9,28
Uang dan Bank :	13,31	13,65	8,11	11,81
Jasa :	9,71	9,25	8,39	8,82
PDRB :	8,25	8,06	6,44	7,24

Sumber : Riau dalam angka tahun 2008, 2009, dan 2010

Ada beberapa hal yang terjadi yang mungkin mengakibatkan turunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di tahun 2009. Pada sub sektor perkebunan terutama kelapa sawit di tahun 2009 tidak mungkin lagi dilakukan dengan ekstensifikasi karena lahan sudah tidak tersedia lagi, disamping itu adanya krisis global yang menyebabkan turunnya harga TBS sehingga menjadi Rp. 500,00 per kg, dan juga perkebunan yang ada walaupun masih produktif tetapi tambahan produksi setiap tahun menurun. Selain dari itu industri yang mengelolah hasil-hasil pertanian mulai kekurangan bahan baku khususnya industri kertas, demikian juga dengan industri kimia lainnya ditambah lagi prasarana dan sarana industri seperti listrik, jalan dan lainnya masih belum memadai. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya kecenderungan turunnya jumlah investasi pada tahun 2009 ini

Usaha-usaha memperkirakan kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran laju pertumbuhan ekonomi tertentu dalam suatu perencanaan pembangunan dilakukan melalui konsep *incremental capital output ratio* (ICOR), Dengan demikian ICOR tersebut merupakan suatu angka yang memperlihatkan perbandingan antara investasi dan mempertambahan pendapatan yang timbul sebagai akibat terjadinya investasi tersebut. Dalam hal tertentu ICOR historis dipergunakan selaku ICOR proyeksi .Sebaliknya tidak jarang pula terjadi Icor historis tersebut di sesuaikan dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu sebelum dipergunakan selaku ICOR proyeksi.

Dasar perkiraan ICOR harus dikemukakan secara jelas sehingga dengan demikian tidak akan mungkin terjadi kesalahan pengertian dalam mempergunakan ICOR tersebut. ICOR yang didasarkan atas produk domestik bruto akan berbeda dengan produk nasional bruto. Di dalam memperkirakan waktu tidak dapat diabaikan peranan waktu atau tenggang waktu, karena investasi yang ditanam pada tahun T biasanya baru akan memberikan tambahan pendapatan pada tahun $t + n$ Namun tidak pula dapat disangkal bahwa dalam sektor tersebut seperti sektor pertanian, khususnya sub sektor pangan tidak perlu tenggang waktu tersebut.

Konsep ICOR ini mempunyai pengaruh yang cukup luas dalam perencanaan pembangunan, Walaupun Harrod Domar selalu hanya bermaksud untuk mencari faktor-faktor yang akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang cukup mantap bagi negara –negara maju. Kelemahan yang terdapat dalam konsep itu ternyata tidak mengurangi manfaatnya selaku peralatan analisis dalam suatu perencanaan ekonomi.

Penetapan sasaran laju pertumbuhan ekonomi mengandung implikasi yang cukup besar di dalam memperkirakan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebagai mana dikemukakan oleh model Harrod Domar, semakin tinggi laju sasaran pertumbuhan ekonomi yang akan di capai semakin besar pula kebutuhan investasi masa mendatang. Perubahan Ekonomi dan Investasi, di pergunakan pula kembali di dalam memperkirakan kebutuhan investasi. Walaupun begitu pemakaian komponen-komponen tersebut mengalami beberapa perbedaan yang mendasar. Di dalam memperkirakan kebutuhan investasi, nilai ICOR dianggap sudah tersedia sehingga bersama-sama dengan perkiraan sasaran laju pertumbuhan ekonomi dipergunakan selaku dasar untuk memperkirakan kebutuhan investasi.

Kebijakan investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan . refleksi dari kebijakan investasi ini akan terlihat didalam perhitungan investasi itu sendiri . dengan demikian teknik perhitungan kebutuhan investasi semata mata merupakan alat untuk menterjemahkan kebijaksanaan investasi tersebut. Tanpa adanya suatu kebijakan investasi yang cukup jelas tidak akan mungkin dapat dilakukan perhitungan investasi di dalam perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan pembangunan Negara Negara sedang berkembang selalu timbul masalah kebijaksanaan investasi yang berorientasi pada teknologi padat karya ata padat modal. Dengan kebijaksanaan investasi padat modal , dengan sendirinya akan lebih banyak mempergunakan alat modal dari pada tenaga kerja . Teknologi padat modal lebih bersifat teknologi maju dan kompleks. Sebaliknya, kebijakan investasi padat karya akan lebih banyak mempergunakan tenaga kerjaa dibandingkan dengan modal atau peralatan mesin. Teknologi padat karya akan bersifat lebih sederhana sehingga lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan teknologi padat modal.

Permasalahan ini akan semakin membengkak bagi Negara Negara sedang berkembang yang jumlah penduduknya besar, dengan tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Dengan semakin terlibatnya perusahaan perusahaan multi nasional dengan teknologi tinggi selalu timbul kecendrungan untuk memilih teknik produksi padat modal . mengingat tenaga ahli yang dipergunakan untuk mengelola perusahaan tersebut sukar diperoleh di dalam negeri, deng an sendirinya pemakaian tenaga asing semakin bertambah besar, ini berarti tingkat pengangguran akan semakin meningkat. Sebaliknya teknik produksi yang padat karya akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan penduduk. Tetapi teknik produksi yang berorientasi pada padat karya tidak selalu dapat ditetapkan begitu saja dalam perusahaan perusahaan modern dengan teknologi tinggi . Sebaliknya teknik produksi padat karya hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan perusahaan tingkat teknologi nya tidak terlalu tinggi . walaupun dalam hal hal tertentu terdapat beberapa pengecualian daalam investasi padat karya ini, seperti misalnya perusahaan elektronika, pakaian jadi dan lain lain .

Sampai saat ini teknologi padat karya masih terbatas pada sektor sektor pertanian mengingat sektor sektor tersebut masih berbentuk usaha rakyat . walaupun usaha usaha untuk mempergunakan teknologi padat karya di luar sektor pertanian masih tetap dilakukan tetapi kecenderungan untuk beralih ke teknologi padat modal sukar dihindari pada masa yang akan datang.

Refleksi pemakaian teknologi pada modal dan padat karya ini terlihat dengan jelas di dalam nilai ICOR yang akan dipergunakan dalam memperhitungkan perkiraan kebutuhan investasi. Nilai ICOR akan semakin meningkat dengan terjadinya pergeseran kebijaksanaan investasi ke arah teknologi padat modal. Sebaiknya nilai ICOR yang rendah merupakan refleksi dari pemakaian modal yang rendah. Dengan demikian akan semakin banyak pula dipergunakan tenaga kerja dalam proses produksi.

Sebenarnya sukar ditentukan batas nilai ICOR yang dapat dikategorikan sebagai refleksi dari kebijakan padat modal atau padat karya , hal ini tergantung pula pada sifat nilai ICOR itu sendiri. Jadi nilai ICOR di atas tiga (3) sudah dapat dianggap sebagai investasi yang berorientasi pada padat modal, sehingga nilai ICOR yang kurang dari tiga (3) terutama sekali antara 2 dan 3 dapat dianggap sebagai investasi padat karya sektoral maupun antar waktu di dalam proses produksi yang lebih berorientasi pada padat modal, tenggang waktu antara investasi dan dampak investasi terhadap pertambahan pendapatan akan lebih besar dari satu tahun. Semakin tinggi teknologi yang digunakan akan semakin lama pula dirasakan dampak investasi terhadap pertambahan pendapatan, umpamanya pada sektor pertambangan minyak bumi

Sebaliknya dalam proses produksi yang berorientasi pada padat karya biasanya tidak terdapat tenggang waktu antara penanaman investasi dan proses pertambahan pendapatan. Bila investasi dilakukan dalam tahun ini , tambahan pendapatan yang akan diperoleh dari investasi itu akan terjadi dalam tahun ini juga. Hal ini terlihat pada sub sektor tanaman pangan atau bahan makanan. Pilihan teknologi ini akan terjelma didalam perkiraan ICOR.

Didalam memperhatikan kebutuhan investasi perlu ditentukan beberapa pengertian investasi, investasi agregat dan sektoral. Institusi dan lokasi pelaksanaan investasi. Dengan demikian dapat pula dihindarkan beberapa kesalahan pengertian didalam melakukan perkiraan kebutuhan investasi tersebut.

Didalam perencanaan pembangunan terdapat dua bentuk pendekatan-pendekatan perkiraan investasi .Pertama pendekatan pendapatan nasional.Dalam hal ini diadakan perbedaan antara pembentukan modal tetap dan pembentukan stok (persediaan).Perkiraan pembentukan modal tetap dilakukan melalui konsep ICOR bruto sehingga diperoleh perkiraan kebutuhan pembentukan modal bruto.Ini berarti didalam perkiraan tersebut telah diperhitungkan kebutuhan penyusutan (W.LEWIS,Development Planing ; The Essential Of Economic Policy,New York ; Harper & Row,1996).Sebaliknya perkiraan kebutuhan stok tidak dilakukan melalui konsep ICOR tetapi didasarkan atas bagian dari produk domestik bruto yang dipergunakan sebagai stock s.Perkiraan kebutuhan investasi melalui pendekatan ini dipergunakan antara lain dalam repelita Filipina dan Malaysia.

Kedua pendekatan pembangunan.Berbeda halnya dengan pendekatan pendapatan nasional,pendekatan anggaran pembangunanmenekankan perbedaan antara kebutuhan investasi untuk pembentukan modal dan berbagai bentuk pengeluaran non investasi yang menyertai perkiraan kebutuhan investasi tersebut.Yang dimaksud dengan non investasi antara lain : subsidi pupuk dan bibit,ganti rugi tanah,bunga dan angsuran hutang,bila ada upah dan gaji dari berbagai kegiatan promosi dan pengeluaran yang tidak terduga.

Oleh karena itu perkiraan pengeluaran non investasi tidak dapat dilakukan melalui ICOR karena pengeluaran ini sama sekali tidak menimbulkan pertambahan modal. Perkiraan kebutuhan investasi agregat memperlihatkan kebutuhan investasi secara keseluruhan.Prekiraan kebutuhan investasi sektoral ampu memperlihatkan kebuthan investasi menurut sektor-sektor yang dipergunakan sam dengan sektor-sektor yang terdapat didalam perhitungan pendapatan nasional.Baik perkiraan kebutuhan investasi agregat maupun kebutuhan investasi sektoral dapat dilakukan melalui perkiraan tahunan atau komulatif selama satu periode perencanaan pembangunan.

Perkiraan kebutuhan investasi agregat dilakukan melalui konsep ICOR agregat dan perkiraan kebutuhan investasi sektoral dilakukan dengan menggunakan ICOR sektoral. Berdasarkan perhitungan yang dijelaskan diatas maka jumlah investasi di provinsi Riau tahun 2007 berjumlah Rp. 103.230,29 milliar atau Rp. 103,23 triliun dan distribusi presentasenya mirip dengan distribusi presentase produk regional bruto atas

dasar harga berlaku. Pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 peranan sektor pertanian 37,25 %, sektor industri 30,16 % dan sektor perdagangan 79,43 %. Distribusi seperti ini juga bercermin pula pada distribusi atau alokasi investasi yaitu dari Rp. 103,23 triliun untuk sektor pertanian saja berjumlah Rp. 55,80 triliun, sektor industri Rp. 32,74 triliun dan sektor perdagangan Rp. 9,07 triliun atau 85,83% jumlah investasi dipropinsi Riau tahun 2007 teralokasi untuk sektor pertanian, industri dan perdagangan hanya sekitar 14,17 % untuk 6 sektor lainnya. (Tabel no 5)

Tabel 5 : Perkiraan Investasi Provinsi Riau Tanpa Migas Tahun 2001, 2008 Dan 2009 Menurut Lapangan (Miliar Rp)

Lapangan Usaha	2007	:	2008	:	2009	:	Jumlah	:	%
Pertanian	55.806,87:		35.464,73:		26.166,70:		117.438,30:		40,83
- Tan. Pangan	674,77:		1.444,95:		991,66:		3.111,38:		1,08
- Perkebunan	44.795,62:		19.540,35:		11.913,37:		76.249,38:		26,51
- Peternakan	636,27:		1.286,10:		1.872,29:		3.794,66:		1,32
- Kehutanan	8.072,26:		10.156,62:		8.327,46:		26.556,24:		9,23
- Perikanan	1.627,95:		3.036,71:		3.061,92:		7.726,58:		2,69
Pertambangan	1.858,28:		2.227,63:		2.374,49 :		6.640,40:		2,25
Industri	23.742,83:		25.748,99:		30.418,58:		79.910,40:		27,78
Listrik	244,91:		320,91:		288,70 :		854,52:		0,30
Bangunan	4.604,76:		6.848,28:		6.303,09:		17.756,13:		6,17
Perdagangan	9.071,54:		10.822,40:		10.625,56:		30.519,50:		10,61
Pengangkutan	2.671,62:		3.374,71:		3.987,11:		10.033,44:		3,49
Usaha dan Bank	2.474,18:		3.693,39:		5.112,55:		11.280,12:		3,92
Jasa	2.755,30:		4.305,42:		6.329,33:		13.390,05:		4,65
PDRB	103.230,29:		92.806,46:		91.60,611:		287.642,86:		100,00

Sumber : Data olahan yang diambil dari berbagai sumber.

Untuk tahun 2008 jumlah investasi propinsi Riau turun cukup tajam sehingga menjadi Rp. 92.806,46 miliar atau Rp. 92,08 triliun atau turun sekitar Rp. 10.423,83 miliar atau Rp 10,42 triliun atau 10,10 % persen. Turunnya jumlah investasi ditahun 2008 berpengaruh pula pada alokasi untuk sektor-sektor penting yaitu untuk sektor pertanian Rp. 25,46 triliun atau 38,21%, sektor industri Rp. 25,74 triliun atau 27,74 %, dan sektor perdagangan Rp. 10,822 triliun atau 11,66 %, sehingga ke tiga sektor tersebut menerima alokasi investasi di tahun 2008 sebesar 77,61% sedangkan di tahun 2007 berjumlah 85,83 %. Sedangkan untuk 6 sektor lainnya menerima alokasi sebesar 22,39% dibandingkan dengan tahun 2007 terdapat kenaikan sebesar 8,22%.

Pada tahun 2009 jumlah investasi di propinsi Riau lebih turun lagi dibandingkan dengan tahun 2007 dan tahun 2008 yaitu hanya berjumlah Rp. 91.606,11 miliar atau Rp.91,60 triliun dan alokasinya tetap terfokus pada tiga sektor penting tersebut yaitu sektor pertanian Rp.26,16 triliun atau 38,93% ,sektor industry Rp 30,41 triliun atau 45,25% dan sektor perdagangan Rp. 10,62 triliun atau 16,99% sehingga aloasi untuk ketiga sektor tersebut adalah 73,35% .Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 85,83% ,ditahun 2008 adalah 77,61% .Sehingga 6 sektor lainnya ditahun 2009 memperoleh alokaso investasi sebesar 26,65%. Setelah diketahui jumlah investasi di Provinsi Riau tahun 2007, 2008 dan 2009, maka perlu diperhatikan sumber-sumber investasi di Provinsi Riau.

Tabel 6 : Sumber Sumber Investasi Provinsi Riau Tahun 2007, 2008, 2009 (triliun Rp)

Sumber	2007	2008	2009
Tabungan masyarakat	62,16	33,16	32,40
Investasi	103,23	92,80	91,60
APBD Riau	3,41	4,20	3,23
Kredit Bank	25,20	32,00	35,35
PMBN	1,38	3,70	4,20
PMA	35,18	46,22	4,20
Lainnya	38,06	6,68	46,94

Sumber : Bank Indonesia, BPS, BPI, Bappeda, Bank-bank lainnya. Adapun yang dimaksud dengan sumber lainnya antara lain dari koperasi UKM, APBD Kabupaten dan Kota yang dapat dikumpulkan.

Yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara jumlah investasi dengan tabungan masyarakat yang perbedaannya sangat menyolok. Jumlah tabungan masyarakat di tahun 2007 adalah 53,11 % dari PDRB harga berlaku, tahun 2008 sebesar 22,24 % dan tahun 2009 menjadi 18,08 %, sedangkan jumlah investasi dibandingkan dengan jumlah PDRB tahun 2007 sebesar 88,20 %, tahun 2008 sebesar 62,23 % dan tahun 2009 menjadi 51,11 %, artinya pelaksanaan investasi di Povinsi Riau tiga tahun terakhir berjalan dengan ketidak seimbangan antara tabungan dengan investasi atau disebut *Saving-Investment Gap* yaitu kelebihan investasi dibandingkan dengan tabungan tahun 2007 sebesar 35,09 %, tahun 2008 adalah 39,99 % dan tahun 2009 menjadi 33,03%.

Dengan besarnya saving –investment gap ini menyebabkan pola distribusi investasi menurut sektor berjalan kurang seimbang . arti nya sektor sektor yang prospeknya cukup baik akan mendapat alokasi yang cukup besar seperti pada sub sektor perkebunan , demikian juga dengan sektor industri dan perdagangan , sedangkan sektor sektor lain yang prospeknya kurang baik mendapat alokasi yg kurang memadai. Sebaliknya sektor sektor yang menurut pemerintah adalah prioritas karena menyangkut dengan kebutuhan pokok rakyat banyak seperti sektor bangunan , sektor listrik dan air minum , sub sektor tanaman dan pangan , sub sek tor peternakan , kurang mendapat perhatian bagi para investor , mereka lebih cenderung memilih sektor yang menguntungkan ditinjau dari segi ekonomis . Hal ini lah yang menyebabkan distribusi atau alokasi investasi yang kurang berimbang tersebut.

Selanjutnya jika dikaitkan antara turunnya jumlah in , investasi dengan turunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau , jelas terlihat saling mempengaruhi . jumlah investasi tahun 2007 sebesar Rp. 103,23 triliun telah memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menjadi 8,25% , tetapi dengan turunnya jumlah investasi di tahun 2008 sebesar Rp. 92, 80 triliun maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga turun menjadi 8, 06 % dan kejadian ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2009 dengan jumlah investasi sebesar 91, 60 triliun maka pertumbuhan ekonomi yang di capai melorot dengan tajam yaitu sebesar 6, 44 % .

Dalam pelaksanaan investasi mulai dari tahun 2007 , tahun 2008 dan tahun 2009 , kelihatannya cukup efisien , karena sebahagian investasi yang berasal dari pengusaha swasta terutama pada sub sektor perkebunan , sektor industri dan perdagangan , hampir seluruhnya di lakukan oleh perusahaan swasta yang mempunyai organisasi modern dan efisien , dengan tenaga kerja terampil serta perencanaan yang terarah . hal ini dapat dilihat dari tingkat ICOR yang terjadi . jika pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007 adalah 23, 43 % dan prosentase jumlah investasi dengan PDRB harga berlaku sebesar 88 , 20 % maka tinggi angka ICOR di tahun 2007 adalah 3, 76 , yang menurut Prof . Hendra esmara jika angka ICOR mencapai lebih dari 3 maka dalam pelaksanaan investasi lebih menggunakan capital intensif walaupun ada indikasi dalam pelaksanaannya terdapat inefisiensi . tetapi pada tahun 2008 pertumbuhan PDBR harga berlaku adalah 27, 42 % dan prosentasi jumlah investasi dengan PDBR harga

berlaku adalah 62, 23 % sehingga angka ICOR di tahun tersebut adalah 2, 27 yang artinya dalam pelaksanaan investasi lebih kepada system padat karya tetapi juga adanya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan investasi. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB harga berlaku adalah 20, 17 % dan persentasi jumlah investasi dengan PDRB harga berlaku adalah 51, 11 % maka angka ICOR adalah 2, 53 .

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa struktur ekonomi yang kurang berimbang sehingga lebih menjurus kepada sub sektor atau sektor yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi lebih diminati oleh penanam modal , menyebabkan sektor sektor yang mempengaruhi hidup rakyat banyak terabaikan seperti sektor sektor bangunan , listrik dan pengangkutan . akibatnya dengan pertumbuhan laju ekonomi yang tinggi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai , seperti ruas ruas jalan yang kurang baik , terjadinya giliran pemadaman listrik dan kelangkaan air minum dan diiringi oleh bencana banjir dan lain .

Kedaaan ini juga menyebab kan pola distribusi atau alokasi investasi juga tidak merata diantara sektor sektor , sehingga kalau terjadi penurunan jumlah investasi pada sektor sektor yang menguntungkan , akan langsung berpengaruh pada laju pertumbuhan secara keseluruhan . apalagi jika dilihat perimbangan antara jumlah tabungan dengan jumlah investasi , ternyata jumlah investasi , ternyata jumlah investasi jauh melebihi jumlah tabungan atau yang biasa disebut SAVING- INVESTMENT GAP , yang jumlah rata rata lebih dari 30% setahun . artinya daerah Riau dalam melaksanakan investasi lebih 30% bersumber dari luar daerah , keadaan ini sangat mempengaruhi arus lalu lintas barang dan modal setiap tahunnya atau biasa disebut kebocoran regional , atau artinya arus barang dan jasa keluar Riau akan lebih banyak dari arus barang dan jasa yang masuk .

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. Laporan Bank Indonesia Provinsi Riau Tahun 2007, 2008 dan 2009.
BPS dan Bappeda Riau. Riau Dalam Angka tahun 2008, 2009 dan 2010
Esmara H. 1974. Perencanaan Pembangunan. PAU EK – UI Departemen Pendidikan
Kebudayaan. Jakarta.
Kuznets S. 1966. Modern Economic Growth , rate, structure and spread. Yale
University Press New Hoven.
Leibenstein H. 1957. Economic Backwadness and Economic growth. Jhon wiley & Son
Inc. New York.
Lewis WA. 1966. Development Planning Essential of economic policy. New York.
Partadireja A. 1977. Perhitungan Pendapatan Nasional. LPPPS. Jakarta
Samuelson PA dan Nordhaus WD. 1985. Economics. Mc. Grow Hill Book Company.
New York.
Timbergen J. 1965. Development Planning. Mc Grow Hill. New York.